

# KAJIAN PENYELENGGARAAN PROGRAM SMK 3+1

OLEH :

PROF DR H MUKHIDIN,ST,M.PD

WAWAN PURNAMA,DRS,MSI

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

# Latar Belakang

1. Dalam mengantisipasi meningkatnya angka pengangguran usia produktif, pemerintah mendorong untuk dikembangkannya jumlah SMK di seluruh kabupaten/kota hingga akhirnya akan dicapai perbandingan antara SMK dengan SMU menjadi 70 : 30

2. Dikaitkan dengan data tahun 2004 - 2005 permasalahan guru khususnya di SMK diantaranya :
  - a. Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan belum memadai (masih kekurangan 11.502 orang)
  - b. Distribusi guru yang tidak merata dan menumpuk di daerah-daerah perkotaan,

- c. Kualifikasi dan kompetensi yang belum memenuhi standar nasional pendidikan (35,51% berijazah dibawah D4/S1),
- d. Masih banyaknya guru yang mengajar tidak sesuai dengan bidang keahliannya (mismatch) (43,3% diindikasikan tidak layak mengajar), dan (
- d. Terbatasnya kemampuan pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan guru (PNS).

3. tujuan umum dan khusus SMK yang terdapat dalam Dokumen I Kurikulum SMK 2004 adalah:
  - a) menyiapkan peserta didik agar dapat menjalani kehidupan secara layak;
  - b) meningkatkan keimanan dan ketaqwaan peserta didik;
  - c) menyiapkan peserta didik agar menjadi warga negara yang mandiri dan bertanggung jawab;
  - d) menyiapkan peserta didik agar memahami dan menghargai keanekaragaman budaya bangsa Indonesia;

- (e) menyiapkan peserta didik agar dapat menerapkan dan memelihara hidup sehat, memiliki wawasan lingkungan, pengetahuan dan seni;
- (f) menyiapkan peserta didik agar dapat bekerja, baik secara mandiri atau mengisi lowongan pekerjaan yang ada di dunia usaha dan dunia industri sebagai tenaga kerja tingkat menengah, sesuai dengan bidang dan program keahlian yang diminati;
- g) membekali peserta didik agar mampu memilih karir, ulet dan gigih dalam berkompetisi, dan mampu mengembangkan sikap profesional dalam bidang keahlian yang diminatinya.

# rasional

1. Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu”.

2. Secara Konstitusi, ditunjukkan bahwa penyelenggaraan SMK mempunyai peranan strategis dalam menentukan keberhasilan pembangunan nasional. Hal itu, sejalan dengan kebutuhan sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi sesuai dengan bidang keahlian yang berkembang di masyarakat, khususnya untuk kepentingan dunia usaha dan industri atau mempunyai kemampuan berwirausaha

### 3. Strategi pembangunan pendidikan menengah kejuruan secara nasional, diarahkan pada:

- a) Perluasan dan pemerataan akses masyarakat terhadap pendidikan;
- b) Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat; dan
- c) peningkatan produktivitas, efisiensi, serta akuntabilitas dalam suatu pengaturan (*good governance*) pendidikan nasional di semua tingkatan pemerintahan. Selain itu, adanya semangat yang menjadi komitmen internasional dari pemerintah Indonesia dalam pembangunan kualitas manusia yang berorientasi global.

4. Kerangka strategik yang telah digulirkan oleh Direktorat Pembinaan SMK, dan dikonkretisasikan menjadi sebuah model atau pola 3 + 1.

*“Artinya waktu belajar di SMK memungkinkan dilaksanakan tiga tahun disekolah, dan satu tahun dilaksanakan di dunia usaha atau industri, melalui on-job atau bentuk lainnya sesuai dengan kebutuhan.”*

5. Dalam mempersiapkan suatu percontohan implementasi kebijakan pendidikan menengah kejuruan (SMK) Pola 3 + 1, diperlukan suatu kajian strategis yang terkait dengan perangkat sistem secara komprehensif dan kholistik.

# Permasalahan

Permasalahan yang terjadi di SMK dan lingkungan Industri yang berkembang di Indonesia di saat ini diantaranya :

1. Siswa yang sekolah pada SMK berasal dari ekonomi menengah ke bawah. Pengembangan sekolah agak tersendat karena minimnya dana untuk SMK swasta, sehingga mereka sangat tidak siap untuk melanjutkan ke perguruan tinggi.
2. Kurikulum KTSP belum sepenuhnya dapat diterapkan pada SMK.

3. Perkembangan teknologi yang cepat, memerlukan kekokohan materi dan struktur kurikulum keahlian yang mantap dan mapan.
4. Kekurang mampuan produsen Indonesia dalam menekan biaya produksi untuk dapat bersaing dengan produk-produk dari negara-negara lain.
5. Indonesia hanya memiliki sedikit industri yang bergerak dibidang peralatan (*capital good*) sebagian besar industri manufaktur mengandalkan import peralatan dan permesinan secara keseluruhan

6. Langkanya pengembangan teknologi produksi dan ekspansi industri teknologi rendah dan berbasis bahan baku lokal seperti makanan, kayu lapis, sepatu yang tidak diikuti dengan pengembangan teknologi yang lebih tinggi
7. Langkanya *support system* teknologi industri yang efektif atau *support system* kemampuan industri manufaktur seperti adanya jaringan pusat produktivitas dan institusi teknis yang membantu mengembangkan produk berteknologi lebih tinggi, misalnya komponen elektronik, sepeda motor, peralatan listrik domestik.

8. Sistem perusahaan manufaktur (manajemen teknologi) yang relatif lemah dalam melakukan alih teknologi, khususnya dalam mengadaptasi dan memodifikasi teknologi dari luar negeri ke dalam pasar lokal
9. Kemampuan sumber daya manusia yang relatif lemah dalam mengoptimalkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi proses produksi dan pemasaran

# Batasan Kajian

1. Ranah konstitusional dalam konteks elaborasi rancang bangun program SMK Pola 3+1;
2. Ranah administrasi kerjasama antar institusi dalam konteks inkubasi program SMK pola 3+1;
3. Ranah fungsi manajemen program SMK Pola 3+1;

4. Ranah kesinambungan dan rekomendasi program SMK pola 3+1;
5. Ranah paradigma dan Implementasi kurikulum SMK
6. Ranah model penyelenggaraan SMK 3+1.
7. Ranah Model Pembelajaran kajian di SMK program 3 tahun dan 4 tahun dan SMK 3+1.

# Tujuan Kajian SMK 3+1

1. Terdeskripsikan kekuatan landasan hukum, peraturan dan turunannya berkenaan dengan rancang bangun kebijakan program SMK Pola 3+1
2. institusi dalam konteks rancang bangun inkubasi program SMK Pola 3+1,
3. Adanya *patok duga* yang dapat dijadikan pedoman fungsi manajemen program SMK Pola 3+1
4. Terdeskripsikanya model pembelajaran SMK 3+1.

# Sasaran

1. Suatu model pelaksanaan kebijakan program SMK 3+1, yang dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien;
2. Suatu model pemecahan masalah bagi peningkatan relevansi dan mutu pendidikan di SMK, sehingga diperoleh komposisi lulusan yang terserap di dunia kerja industri dalam negeri; luar negeri; usaha mandiri dan studi lanjut.
3. Suatu model pembelajaran untuk SMK.

# Ruang Lingkup

1. Pendahuluan
2. Kajian Teoritis
3. Kajian Lapangan
4. Pembahasan dan rekomendasi.
5. Penutup
6. Lampiran-lampiran

# Metodologi

Metodologi yang digunakan dalam kajian penyelenggaraan SMK pola pembelajaran SMK 3+1 adalah menggunakan metode *Research dan Development* (R&D) dengan pendekatan kombinasi antara kuantitatif dan kualitatif

# Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Studi dokumentasi
2. *Discussion groups* untuk memperoleh format model penyelenggaraan SMK 3+1
3. Penyusunan instrumen pola penyelenggaraan SMK 3+1.
4. Penyebaran instrumen dilakukan ke seluruh SMK di Indonesia dengan sampel 22 propinsi, yang terdiri atas 37 kepala sekolah, 206 guru, 28 Kepala Dinas Pendidikan, Pemda yang ada di 26 kabupaten/kota.

5. Melakukan seminar penyelenggaraan SMK pola pembelajaran 3+1
6. Melakukan discussion group dengan Kepala Dinas Pendidikan, Pemda kab/kota, Kepala Sekolah, guru-guru, pakar pendidikan, praktisi pendidikan, pakar dunia usaha dan dunia industri.
7. Melakukan R&D dengan cara melakukan uji terbatas pada guru-guru SMK produktif di kota Bandung dan uji lebih luas ke sejumlah guru-guru sesuai dengan populasi yang telah ditetapkan.
8. Melakukan studi eksplorasi atas kajian pola pembelajaran SMK 3+1.

# Subjek Penelitian,

Subjek Penelitian, yakni guru-guru SMK Bidang Keahlian Bisnis dan Pariwisata dan Teknologi Rekayasa, kepala sekolah, kepala dinas pendidikan, Pemda kab/kota, Praktisi DU/DI, Pakar Pendidikan dan para praktisi.

# Kajian dokumen

Secara lengkap, kajian dokumen pola pembelajaran SMK tertuang dalam laporan ini.

Secara garis besar di peroleh bahwa berdasarkan studi dokumen RPP yang ada pada guru-guru mata pelajaran kejuruan umumnya guru-guru telah membuat RPP, akan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut diatas yakni :

a. Menggunakan metoda mengajar yang tidak sesuai dengan karakteristik dari setiap indikator dan kompetensi yang hendak dicapai pada setiap mata pelajaran. Guru-guru tidak mencantumkan metoda mengajar yang mengarah siswa aktif seperti metoda diskoveri inkuiri dalam bentuk tugas terstruktur dan mandiri tidak terstruktur. Guru tidak menggunakan metoda mengajar yang bervariasi.

b. Pada komponen Pembelajaran tidak dijelaskan adanya kegiatan pembukaan atau awal, kegiatan inti atau pembentukan kompetensi dan kegiatan penutup atau kegiatan akhir.

- c. RPP yang disusun tidak operasional dan hanya sebagai pelengkap administrasi guru
- d. Pengembangan indikator tidak relevan dengan Kompetensi Dasar. Indikator tidak dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur dan diamati yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap.

- e. Tujuan pembelajaran tidak Menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar.
- f. Pada komponen penilaian tidak memuat soal yang akan digunakan dan dan tidak mencantumkan rambu-rambu penialaiannya serta kunci jawaban dari soal.

# Pembahasan kesiapan model penyelenggaraan SMK pola pembelajaran 3+1

Berdasarkan hasil analisis dokumen, terjadi perubahan jam pelajaran secara bertahap yakni : a. perubahan jam pelajaran

<b>NO</b>	<b>KELOMPOK</b>	<b>2004</b>	<b>KTSP Standart</b>	<b>Berdasarkan Analisis</b>
1	Normatif	864	896	976
2	Adaptif	1632	1920	2138
3	Produktif	2848	1044	1858
4	Mulok	0	192	384
	<b>Jumlah</b>	<b>5344</b>	<b>4052</b>	<b>5356</b>

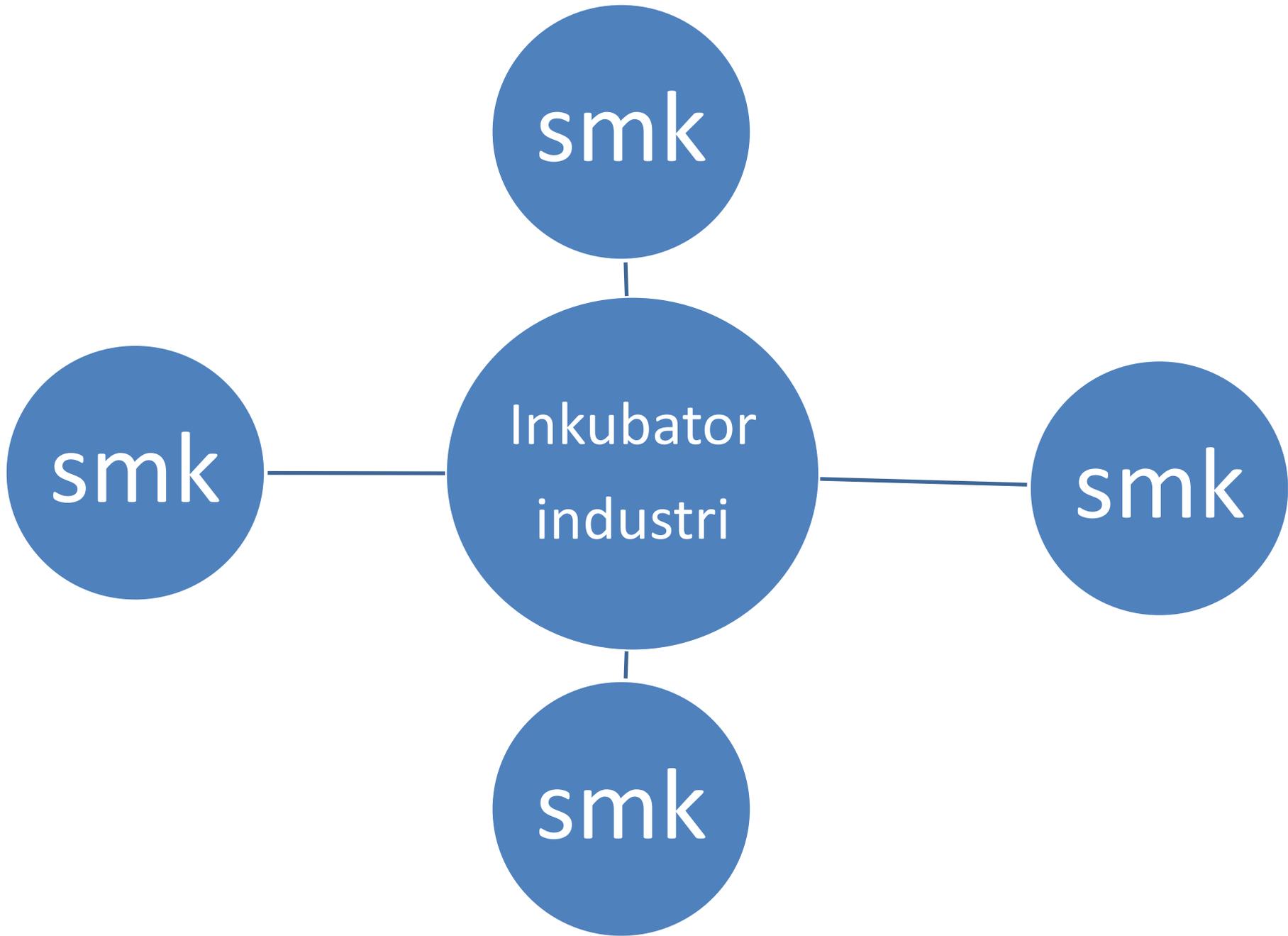
Per minggu : +- 48 jam

normal : 32 jam

Dalam implementasi nya, untuk sekolah yang berakreditasi C atau belum memiliki akreditasi agak berat.

Oleh karena itu perlu adanya penambahan program keahlian selama 1 tahun

- b. Model pembelajaran yang telah dikembangkan yakni model kontekstual karena terbukti dapat meningkatkan prestasi mengajar guru dan belajar siswa.
- c. Kami menyarankan pola penyelenggaraan SMK 3+1 dengan hubungan industri SMK dilakukan seperti pada petunjuk berikut ini :



# Proses industri terdiri dari :

- 1. Proses Perencanaan Produk.**
- 2. Proses Perakitan**
- 3. Proses Quality Control**

# Produk Inkubator Industri

Produk yang dihasilkan oleh Inkubator Industri haruslah sedemikian sehingga memenuhi beberapa syarat ,antara lain :

- a. Berkaitan dengan kompetensi teknis siswa SMK yang menjadi binaannya
- b. Sedapat mungkin mencerminkan produk unggulan daerah setempat
- c. Bermutu dan harga yang kompetitif sehingga unggul dipasar

# DESKRIPSI HASIL PENELITIAN

## KAJIAN LAPANGAN :

Berdasarkan Kuesioner, wawancara yang dilakukan kepada guru dan kepala sekolah serta hasil observasi yang dilakukan terhadap SMK diberbagai provinsi di Indonesia yang berjumlah 57 SMK sekolah diperoleh hasil sebagai berikut :

NO	provinsi	Jumlah smk	No	provinsi	Jumlah smk
1	Papua Barat	1	12	Sumatera Barat	1
2	Jawa Tengah	5	13	Bangka Belitung	1
3	Sulawesi Selatan	1	14	Jawa Timur	2
4	Sumatera Selatan	1	15	NAD	2
5	Jawa Barat	18	16	Yogyakarta	1
6	Banten	5	17	Kepulauan Riau	1
7	Maluku	2	18	NTT	1
8	Kalimantan Selatan	2	19	Lampung	2
9	Sumatera Utara	3	20	DKI Jakarta	2
10	Sulawesi Utara	3	21	Bengkulu	1
11	Bali	1	22	Sulawesi Tenggara	1

Terhadap pertanyaan apakah anda setuju dengan kebijakan pemerintah untuk menyelenggarakan program SMK : SMA = 70 : 30?

- Jawabannya adalah 100 % setuju walaupun ada beberapa saran dan catatan-catatan terutama mengenai kesiapan pemerintah dalam penyaluran tenaga kerja lulusan SMK yang akan semakin banyak dan kelengkapan sarana prasarana bagi tercapainya proses belajar mengajar yang efektif.

# Terhadap pertanyaan apakah anda setuju pada penyelenggaraan program SMK 3+1?

- Setuju : 84,21 %
- Tidak setuju : 15,79 %

smk yang tidak setuju pada umumnya merasa program smk 3 dan 4 tahun sudah cukup , hanya perlu ada perbaikan yang efektif

# Terhadap pertanyaan apakah sekolah anda siap menyelenggarakan program SMK 3+1?

- Siap : 85,11%
- Belum siap : 14,89%

SMK yang menyatakan setuju tetapi belum siap lebih disebabkan mereka merasa perlu penataan sekolah terlebih dahulu baik SDMnya, sarana serta kelengkapan program lainnya

Terhadap pertanyaan Kompetensi keahlian apakah yang akan anda kembangkan dalam program SMK 3+1

Teknik sepeda motor , teknik AutoMobil, Teknik Audio Video ,Teknik Multimedia, Teknik Komputer & I.T , Teknik Las, Cor, Pengecatan, Electroplating, Balancing, Teknik Alat rumah tangga listrik s, Teknik Konstruksi bangunan, Teknik pertekstilan, Jasa pariwisata, Jasa Perhotelan, Tata boga , Tata busana, Teknik Pendinginan dan Teknik bangunan

Terhadap pertanyaan Model pembelajaran apakah yang akan digunakan jika program SMK 3+1 dilaksanakan

pada umumnya semua smk yang di kunjungi menyatakan bahwa : Komponen-komponen model pembelajaran yang lebih berorientasi pada model pembelajaran kontekstual karena model ini mampu mengaitkan langsung antara teori dengan praktek

# KAJIAN KEBIJAKAN SMK 3+1 (Landasan Filosofis)

- Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
- Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.

- Pendidikan sistem terbuka: fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan
- Pendidikan multimakna: proses pendidikan yang diselenggarakan dengan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, pembentukan watak dan kepribadian, serta berbagai kecakapan hidup

# KAJIAN KEBIJAKAN SMK 3+1 (Landasan hukum)

- UU RI nomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional pasal 8 tentang peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan
- PP RI nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan pasal 6 ayat 1 yang menyatakan bahwa kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan dan khusus pada jenjang dasar dan menengah terdiri atas *“lama penyelenggaraan SMK/SMA tiga tahun, maksimum 4 tahun sesuai dengan tuntutan program keahlian”*,

- PP RI no 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah pusat dan daerah
- PP RI no 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan dasar dan menengah dialokasikan dalam dalam anggaran belanja daerah
- Permen diknas RI nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi

- Permen diknas no 21,22,23,24,....47 tahun 2007 tentang pelaksanaan standar-standar nasional pendidikan
- Permen diknas RI nomor 24 tahun 2006 tentang pelaksanaan Permen diknas RI nomor 22 tahun 2006, Permen diknas RI nomor 23 tahun 2006 serta Permen diknas RI nomor 6 tahun 2007 tentang perbaikan Permen diknas RI nomor 24 tahun 2006
- Permen diknas RI nomor 19 tahun 2007 tentang standar pengelolaan pendidikan

# Kajian ekonomi

Kajian ekonomi meliputi

1. Kondisi riil yang dimiliki masyarakat untuk dapat memperoleh pendidikan yang bermutu dengan biaya terjangkau mengingat strata ekonomi penduduk Indonesia mayoritas berada pada golongan menengah ke bawah sehingga daya jangkau pembiayaan sekolah sangat terbatas.
2. Peningkatan pertumbuhan ekonomi mikro dari masyarakat yang diukur dari GNP yang dimiliki masyarakat. Sektor ekonomi mikro yang berorientasi pada home industry dengan bahan baku asli dalam negeri ternyata tidak terpengaruh langsung oleh resesi global

# KAJIAN MODEL PENDAMPINGAN SMK 3+1

Kajian model pendampingan pada program pendidikan SMK di lakukan salah satunya melalui system incubator industry SMK yang memiliki sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kompetensi siswa SMK di bidang industri melalui pengalaman kegiatan bekerja langsung didalam lingkungan industri ,sehingga diharapkan lulusan SMK telah mengantongi jam terbang tertentu di bidang industri dan lebih siap pakai untuk bekerja
2. Sebagai Business Entity maka Inkubator Industri SMK diharapkan mampu menghasilkan produk-produk yang berkualitas dan kompetitif.

# Kajian kurikulum

- Kajian Kurikulum yang dilakukan terhadap SMK sebagian besar menggunakan KTSP sebagai kurikulum pembelajarannya. Untuk mata pelajaran produktif dengan orientasi keahlian, maka SMK menggunakan kurikulum yang di sesuaikan dengan standar industri



# Beberapa solusi dan saran pengembangan program smk

Program pemerintah dalam pelaksanaan pendidikan SMK : SMA = 70 : 30 harus difahami sebagai :

1. upaya menyiapkan lebih banyak lulusan tingkat menengah yang memiliki keterampilan dan kompetensi untuk siap terjun di dunia kerja
2. mengakomodasi kebutuhan tenaga kerja lulusan SMK untuk bekerja di dalam maupun luar negeri dengan standar tertentu
3. pemerintah harus lebih memperbaiki sarana dan prasarana bagi peningkatan pelaksanaan program pendidikan SMK yang memang biayanya cukup tinggi
4. didasarkan pada pengkajian yang mendalam tentang pentingnya penambahan SMK untuk mengakomodasi kebutuhan DU/DI

2. pentingnya pelaksanaan program SMK 3+1 didasarkan pada kebutuhan riil di masyarakat khususnya lulusan SMK untuk :

- a) meningkatkan kemampuan produktif bagi lulusan SMK agar siap bekerja di industry maupun dunia usaha
- b) memberikan solusi bagi lulusan SMK yang belum memiliki sertifikasi sesuai standar yang di syaratkan DU/DI
- c) mempersiapkan lulusan SMK yang lebih siap bersaing baik di dalam maupun luar negeri
- d) memberikan jaminan kepada lulusan program SMK 3+1 untuk memperoleh peluang yang lebih besar mendapatkan pekerjaan baik di dunia industry maupun berwirausaha

### 3. kesiapan SMK dalam melaksanakan program SMK 3+1 di dasarkan kepada :

- a) adanya sarana yang memadai bagi pelaksanaan proses belajar mengajar
- b) partisipasi aktif dari PEMDA dan dunia industry pendamping
- c) adanya program unggulan yang dirasakan memang cukup diminati oleh siswa sesuai tuntutan industry
- d) keinginan yang kuat dari SMK untuk meningkatkan kompetensi lulusan agar lebih berkualitas dan bersertifikat industri

4. program unggulan yang paling diminati siswa (di atas 10%) untuk dilanjutkan dalam program magang melalui program SMK 3+1 adalah:

- a) Teknik sepeda motor (24,56 %)
- b) Teknik Auto Mobil (19,30 % )
- c) Teknik Komputer & I.T sebanyak (12,28 %)
- d) Teknik Audio Video ( 10,52 %)

Disamping program-program khusus yang juga diminati disetiap SMK diprovinsi tertentu seperti Las dan pabrikan ,tekstil dan industri pariwisata

5. Model pembelajaran kontekstual adalah model yang paling cocok diterapkan dalam program SMK 3+1 karena disusun berdasarkan prosedur yang sistematis disertai langkah-langkah yang mudah di fahami dan operasional serta mampu menghubungkan langsung antara teori dan praktek di lapangan

6. implementasi model pembelajaran meliputi percobaan terbatas pada kelompok guru dengan hasil yang sangat efektif dimana guru dapat dengan mudah mendesain proses belajar mengajar yang lebih interaktif dan komunikatif serta memberikan dampak yang lebih luas pada beberapa SMK yang menerapkan pola 3 tahun dan 4 tahun dengan peningkatan hasil belajar yang cukup signifikan.

Kajian kebijakan dalam pelaksanaan program SMK 3+1 didasarkan pada

- a) landasan filosofis yang memberikan landasan sikap dan moral dalam kerangka fleksibilitas kebutuhan masyarakat dalam pemenuhan haknya memperoleh pendidikan yang berkualitas
- b) landasan hukum yang berisi UU dan Peraturan pemerintah yang memberikan payung hukum bagi keterlaksanaan program SMK 3+1

# Temuan-temuan diAPangan

1. Pengembangan indikator tidak relevan dengan Kompetensi Dasar. Indikator tidak dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur dan diamati yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap.

2. Kurikulum yang diajarkan kurikulum KTSP 2006, tetapi ada sebagian SMK yang masih menggunakan kurikulum 2004, terutama SMK yang memiliki Akreditasi C dan belum terakreditasi.
3. Dari segi kemitraan SMK 3 tahun ini kurang begitu lengkap, sehingga banyak lulusan kesulitan mencari pekerjaan. Hasil wawancara dengan beberapa kepala Diknas jumlah lulusan SMK banyak yang belum tersalurkan sekitar 60% dari jumlah lulusan.

4. Berdasarkan hasil angket dan wawancara diperoleh hasil bahwa komponen-komponen untuk SMK 3+1 yakni : SMK, Kadin BKSP, LSP, PJTKI dan DUDI. Pimpinan sekolah, Kasek dan guru-guru sependapat bahwa pola penyelenggaraan SMK 3+1 seperti ditunjukkan pada gambar berikut ini:

# Kesimpulan

- Sebagian besar SMK di Indonesia yang menjadi subyek penelitian yaitu 84,21 % Setuju dengan penerapan program SMK 3 +1 terutama sekolah yang berstandat internasional atau SMK dengan nilai akreditasi A dan B
- Dari SMK yang setuju untuk pelaksanaan program 3+1 ternyata hanya : 85,11% yang menyatakan siap. Yang setuju tetapi belum siap lebih disebabkan masalah teknis seperti fasilitas dan kesiapan sumber daya sekolahnya
- Untuk menunjang keterlaksanaan program SMK 3 +1, diperlukan model pembelajaran yang lebih berorientasi pada peningkatan aktifitas siswa yaitu model pembelajaran kontekstual

- Kajian model pendampingan pada program pendidikan SMK 3+1 di lakukan salah satunya melalui system incubator industry SMK yang bertujuan meningkatkan kompetensi siswa SMK di bidang industri melalui pengalaman kegiatan bekerja langsung didalam lingkungan industry dan juga Sebagai Business Entity maka Inkubator Industri SMK diharapkan mampu menghasilkan produk-produk yang berkualitas dan kompetitif.

- Program unggulan yang paling diminati siswa (di atas 10%) untuk dilanjutkan dalam program magang melalui program SMK 3+1 berdasarkan hasil kajian yang dilakukana di 57 SMK se Indonesia adalah:
  - Teknik sepeda motor (24,56 %)
  - Teknik Auto Mobil (19,30 % )
  - Teknik Komputer & I.T sebanyak (12,28 %)
  - Teknik Audio Video ( 10,52 %)
- Disamping program-program unggulan lainnya yang menjadi cirri khas setiap provinsi

- Dalam pelaksanaan program SMK 3 +1 tahun, kendala yang mungkin dialami dalam program SMK 3+1 secara umum adalah :
  - Keberlangsungan sarana yang digunakan secara terus menerus
  - Lamanya waktu studi
  - Keterbatasan lapangan kerja yang disiapkan pemerintah
  - Belum semua DU/DI atau PEMDA memberikan dukungan efektif
  - Ketersediaan SDM penyelenggara yang betul-betul memahami program 3+1
  - Kesesuaian antara tuntutan DU/DI dengan kurikulum yang di terapkan

- Keunggulan diterapkannya program ini berdasarkan kajian yang dilakukan terhadap SMK se-indonesia antara lain :
  - Mampu meningkatkan kompetensi professional lulusan SMK untuk lebih siap terjun di dunia kerja karena lebih matang dan mandiri
  - Lulusan program ini mendapatkan sertifikasi profesi sesuai dengan standar kompetensi yang di syaratkan industry
  - Mendapatkan program setara D1 sebagai bahan untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi
  - Memiliki jiwa entrepreneur bagi lulusan yang ingin mengembangkan potensi dirinya untuk berwirausaha

# rekomendasi

- Program SMK 3+1 layak untuk diterapkan di SMK dengan akreditasi sekurang-kurangnya B
- Pola pendampingan SMK 3 +1 dilakukan melalui program system incubator industry SMK.

**TERIMA KASIH**